

OPTIMALISASI AKUNTABILITAS DESA BUNGA MELALUI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN SISKEUDES (STUDI KASUS PADA DESA BUNGA, KEC. MATTIRO BULU, KAB.PINRANG)

*OPTIMIZATION OF VILLAGE ACCOUNTABILITY IN DESA BUNGA THROUGH
THE IMPLEMENTATION OF THE SISKEUDES FINANCIAL SYSTEM
(A CASE STUDY IN DESA BUNGA, MATTIRO BULU DISTRICT,
PINRANG REGENCY)*

Herlinda ¹, Yadi Arodhiskara ²,
Sariana Damis ³

Email: herlindaaa.02@gmail.com¹, yadhi01@gmail.com², saranadamis@gmail.com³

¹Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
^{2,3}Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan
Kode Pos 91131

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam pengelolaan keuangan di Desa Bunga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan di Kantor Desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bunga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor utama yang mendukungnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, infrastruktur teknologi yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran desa. Penelitian ini sejalan dengan teori stewardship, di mana pemerintah desa sebagai pengelola bertanggung jawab menyajikan informasi yang transparan kepada masyarakat sebagai pemilik dana.

Kata Kunci: Implementasi SISKEUDES, pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, Kualitas SDM, Infrastruktur Teknologi, partisipasi masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES) in financial management in Desa Bunga. This research employs a qualitative approach with a case study method. This approach was chosen to gain a deeper understanding of financial management practices in the Village Office through the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES). The study reveals that the implementation of SISKEUDES in Desa Bunga has a positive impact on enhancing the accountability of village financial management. The key supporting factors include the quality of human resources (HR) among village officials, adequate technological infrastructure, and active community participation in budget oversight. This research aligns with stewardship theory, in which the village government, as the manager, is responsible for providing transparent information to the community as the rightful owners of the funds.

Keywords : SISKEUDES Implementation, Village Financial Management, Accountability, Transparency, Human Resource Quality, Technological Infrastructure, Community Participation.



PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah tertentu dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat di wilayahnya. Desa ini dapat berupa desa adat atau memiliki sebutan lain yang serupa. Pengelolaan desa didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan tetap dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Zain & Siddiq, 2015).

Akuntansi pemerintahan dapat diartikan sebagai proses yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan publik melalui tahapan pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, dan analisis transaksi keuangan publik. Tujuan utama akuntansi pemerintahan meliputi memastikan akuntabilitas dan mendukung pengendalian manajemen. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan atau berbagai aktivitas yang dilakukan selama periode tertentu (Wulandari, 2022).

Pengelolaan keuangan desa meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan ini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan sistematis, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola keuangan dan aset desa secara efisien, termasuk dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Prinsip utama yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa mencakup partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, dan keadilan, selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, proses pengelolaan ini harus berpedoman pada peraturan desa yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Rusmianto & Stefanus, 2019).

APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang disusun bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian disetujui dan disahkan oleh pemerintah desa. APBDes mencerminkan strategi pemerintah desa dalam mencapai tujuan pembangunan dan pengelolaan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas tiga komponen utama: pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Proses penyusunannya dilakukan berdasarkan pedoman yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam merancang, membahas, hingga menetapkan APBDes. Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan anggaran tersebut (Anggraeni & Fitriyah, 2024).

Desa Bunga merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan SISKEUDES. Namun, efektivitas penerapan sistem ini masih perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi SISKEUDES di Desa Bunga dan memberikan rekomendasi bagi desa-desa lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan.

Fitur-fitur yang menjadi output dari Siskeudes tentunya memiliki arah yang sangat jelas yakni menciptakan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan di Desa. Mardiasmo (The et al., 2024) menguraikan bahwa Akuntabilitas Keuangan Desa yakni kewajiban pihak pemegang amanah (agent) atau dalam hal ini pemerintah Desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) dimana salah satunya adalah masyarakat desa yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Selain itu, Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka buat dalam pengelolaan dana desa, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat mengenai penggunaannya. Menurut (Susanoo & Rachmawati, 2024), penerapan transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara efisien, efektif, dan adil. Transparansi memberikan masyarakat kesempatan untuk mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa, sehingga mereka dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan publik.

Namun, di banyak desa, termasuk Desa Bunga, terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya transparansi, lambatnya pelaporan, serta lemahnya pengawasan internal. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat dan rawan terjadi penyelewengan dana. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi sangat penting agar dana desa dapat dikelola dengan tepat, efisien, dan transparan.

Desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam hal kualitas laporan keuangan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah mengembangkan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), adalah aplikasi yang dirancang untuk membantu desa dalam mengelola keuangan dengan cara yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Aplikasi ini mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa secara sistematis dan mudah diakses. Dengan penerapan SISKEUDES, diharapkan desa-desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mengurangi kesalahan administratif, serta memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan di Kantor Desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Metode studi kasus diterapkan pada suatu sistem yang terikat oleh waktu atau tempat tertentu, seperti program, kegiatan, peristiwa, atau kelompok individu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, memahami makna, dan mendapatkan wawasan dari kasus yang diteliti. Perlu dicatat bahwa suatu kasus tidak dapat mewakili seluruh populasi dan tidak bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan. Kesimpulan dari studi kasus hanya berlaku untuk kasus yang diteliti, karena setiap kasus memiliki karakteristik dan sifat yang khas (Adolph, 2016). Berikut adalah tabel informan atau sumber informasi yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, yaitu; BUMDes yang ada di 11 desa di kecamatan curio kabupaten enrekang, Ada 4 pihak yang menjadi

Tabel 1. Tabel Informan

No.	Nama	Keterangan
1	Zainuddin	Kepala Desa Bunga
2	Zaenab, S.E	Sekretaris Desa Bunga
3	Sumarwah	Bendahara Desa (Kaur Keuangan desa bunga)
4	Syamsuddin	Perwakilan Masyarakat 1
5	Hasnia	Perwakilan Masyarakat 2

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber informasi yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ini yaitu menggunakan data primer data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab. Alat bantu yang digunakan dalam memperoleh data primer tersebut yaitu data dari hasil wawancara seperti catatan tertulis dan alat perekam. Peneliti melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi perekam suara pada telepon genggam atau handphone. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti memanfaatkan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai cara, baik yang bersifat komersial maupun nonkomersial. Sumber data sekunder dapat berasal dari berbagai tempat, sepeBiro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui observasi atau dokumentasi (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023).
2. Metode pengambilan dan pengumpulan informasi dalam penelitian ini yaitu dengan teknik pengamatan (observation), wawancara, dokumentasi dan juga Browsing Internet. Observasi merupakan metode dalam pengumpulan informasi dengan cara mengamati secara langsung objek dan subjek yang menjadi fokus penelitian. Tahap observasi meliputi penentuan objek yang akan diteliti, pengumpulan data melalui observasi secara langsung dan pencatatan hasil pengamatan tersebut. Browsing internet digunakan untuk memperoleh informasi tambahan berupa data sekunder yang relevan dengan penelitian.
3. Mengintrepetasikan hasil wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa. Siskeudes, yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dibuat untuk membantu pemerintah desa dalam mencatat, mengelola, dan menyusun laporan keuangan desa secara sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun indikator-indikator yang untuk menilai Implementasi Siskeudes, sebagai berikut:

a. Penggunaan aplikasi Siskeudes

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait Penggunaan aplikasi Siskeudes:

Seberapa sering aplikasi digunakan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan data keuangan, dan apakah penggunaanya dirasa mempermudah pekerjaan dibandingkan metode manual? Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap sistem untuk menjalankan aplikasi dalam mendukung efisiensi kerja dan integrasi dengan sistem pengelolaan keuangan desa?"

Bendahara Desa (Sumarwah); "Sebagai bendahara tupoksinya dalam mengelola keuangan desa, aplikasi Siskeudes ini mutlak digunakan setiap transaksi keuangan desa, baik itu dari pengangguran, tata kelola keuangan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem administrasi dan pelayanan desa. aplikasi Siskeudes Yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa. Semua hasil laporan pengelolaan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi Siskeudes harus dipublikasikan melalui laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun anggaran yang berjalan, yang kemudian dipajang pada spanduk transparansi desa di papan informasi grafik sistem pengembangan informasi desa."

b. Kemamuan Aarat Desa

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Kemampuan aparat desa:

"Bagaimana tingkat pemahaman aparat desa terhadap fitur-fitur dalam aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan desa? Apakah aparat desa telah mendapatkan pelatihan atau pendampingan yang memadai untuk memastikan penggunaan aplikasi secara optimal dan mengurangi kesalahan administrasi?"

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); pelatihan awalnya memang membantu, tapi di saat ada perubahan dalam sistem kaur keuangan kadang merasa kesulitan untuk mengakses fitur terbaru. Kalau ada pendampingan tambahan itu pasti sangat membantu. Terutama untuk memastikan semua perangkat bisa mengakses atau pakai Siskeudes."

Bendahara Desa (Sumarwah); "Aplikasi Siskeudes dapat diakses secara offline oleh admin atau kaur keuangan (saya sendiri) yang ditunjuk dalam penginputan dan pengelolaan laporan keuangan desa. sebagai admin Siskeudes kami mendapatkan pelatihan-pelatihan dalam penginputan perencanaan, penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan belanja desa. Aplikasi Siskeudes pada saat ini masih dioperasikan secara offline, jadi tidak ada kendala walau jaringan tidak stabil."

c. Ketepatan Waktu

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Ketepatan waktu:

"Apakah penggunaan aplikasi Siskeudes membantu mempercepat proses penyusunan laporan keuangan desa dibandingkan metode manual? Seberapa efektif fitur otomatis dalam aplikasi Siskeudes dalam mendukung penyelesaian laporan tepat waktu?"

Bendahara Desa (Sumarwah); "Siskeudes sangat membantu, apalagi fitur otomatisnya. Tinggal masukan data dengan benar, laporan keuangan bisa selesai lebih cepat dan nggak ribet dibanding cara lama."

d. Kemudahan Akses

Berikut adalah hasil wawancara dari Aparat Desa Bunga terkait indikator Kemudahan akses:

"Apakah aplikasi Siskeudes dapat diakses secara fleksibel dalam berbagai kondisi, seperti secara offline atau dengan koneksi internet yang tidak selalu stabil?"

Bendahara Desa (Sumarwah); "yang hanya bisa mengakses sistem ini memang hanya saya, meskipun kadang sistem di update membuat saya agak sulit menyesuaikan, awalnya mungkin perlu waktu untuk belajar dan saya usahakan benar-benar teliti dan memahami setiap fitur yang ada. Untuk mengakses, Siskeudes memang bisa digunakan secara offline, jadi kalau jaringan kurang stabil, pekerjaan masih bisa jalan. Tapi nanti waktu sinkronisasi data, tetap butuh koneksi internet."

2. SDM (Kualitas Sumber Daya Manusia)

SDM (Kualitas sumber daya manusia) adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan desa, termasuk implementasi sistem seperti Siskeudes di desa bunga. SDM yang berkualitas mencakup kemampuan, pengetahuan, dan sikap individu yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab.

a. Tingkat pendidikan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai tingkat pendidikan;

“Seberapa besar pengaruh tingkat pendidikan aparat desa terhadap pemahaman mereka terhadap aturan, konsep keuangan, dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes? Apakah aparat desa dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih efektif dalam mengelola keuangan desa dibandingkan yang lain? Jika iya, bagaimana hal ini terlihat dalam praktik sehari-hari?”

”Kepala Desa (Zainuddin); “Tingkat pendidikan memang berpengaruh, terutama dalam memahami aturan, terutama dalam memahami aturan, konsep keuangan, dan penggunaan aplikasi seperti Siskeudes. Aparat dengan pendidikan lebih tinggi biasanya lebih cepat paham dan lebih teliti, terutama dalam hal administrasi keuangan. Tapi, semua perangkat desa trus kami dorong untuk belajar dan saling membantu agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.”

b. Pelatihan dan Keterampilan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Pelatihan dan Keterampilan;

“Sejauh mana pelatihan yang diberikan kepada aparat desa membantu meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam pengelolaan keuangan, termasuk penggunaan aplikasi seperti Siskeudes? Apakah pelatihan yang diikuti oleh aparat desa mencakup pemahaman tentang aturan terbaru dan cara mengatasi tantangan teknis atau administratif? Jika iya, bagaimana efektivitasnya?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Pelatihan yang saya ikuti banyak membantu dalam penggunaan Siskeudes dan memahami aturan terbaru. Kadang perlu pelatihan lebih banyak untuk mengatasi masalah teknis tertentu.”

c. Pengalaman Kerja

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Pengalaman kerja;

“Bagaimana pengalaman kerja aparat desa mempengaruhi kemampuan mereka dalam memahami prosedur dan menyelesaikan tugas terkait pengelolaan keuangan desa? Apakah aparat desa lebih berpengalaman menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi masalah teknis dan administratif? Jika iya, bisakah anda memberikan contoh konkret?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Pengalaman kerja sangat mempengaruhi kemampuan aparat desa dalam memahami prosedur dan menyelesaikan tugas keuangan. Yang lebih berpengalaman biasanya lebih cepat tanggap, terutama dalam menghadapi masalah teknis atau administratif. Contohnya, bendahara yang sudah lama bertugas lebih paham cara menyusun laporan keuangan secara tepat waktu meskipun ada perubahan aturan.”

3. Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi adalah elemen penting yang mendukung efektivitas pengelolaan keuangan desa, termasuk implementasi sistem seperti Siskeudes di desa bunga. Infrastruktur ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan dukungan teknis yang memastikan teknologi dapat berfungsi dengan optimal.

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bungan terkait kepatuhan terhadap peraturan:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan undang-undang? Apakah pemerintah desa mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah desa dalam menyusun laporan seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran, dan bagaimana proses pengawasan terhadap hal ini dilakukan?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Kami pastikan laporan keuangan desa sesuai undang-undang dengan mengikuti panduan dari pemerintah, dan saya menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan, seperti APBDes dan realisasi anggaran. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dari kecamatan dan inspektorat kabupaten untuk memastikan semuanya sudah sesuai aturan.”

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai keterbukaan informasi keuangan:
 “Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara transparan? Bagaimana keterbukaan informasi keuangan desa membantu memperkuat fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan desa (BPD)?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Kami pastikan informasi keuangan desa terbuka untuk masyarakat dengan menyampaikannya lewat musyawarah desa dan papan informasi. keterbukaan ini membantu BPD dalam mengawasi karena mereka bisa ikut memantau dan memberi masukan berdasarkan data yang tersedia.”

c. Pelaporan yang Tepat waktu

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga terkait pelaporan yang tepat waktu:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan pelaporan keuangan diselesaikan dan diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan? Sejauh mana ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mempengaruhi proses evaluasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “ Saya pastikan laporan keuangan selesai tepat waktu dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau laporan tidak tepat waktu, itu bisa mempengaruhi penilaian kabupaten dan berpengaruh ke keputusan anggaran berikutnya.”

d. Pelibatan BPD dan Masyarakat

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa terkait Pelibatan BPD dan Masyarakat:

“Bagaimana pemerintah desa melibatkan BPD dan masyarakat dalam proses pengelolaan dana dan pengawasan keuangan desa?”

Kepala Desa (Zainuddin); “BPD dan masyarakat desa terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa lewat musyawarah desa dan rapat rutin. Mereka ikut memantau penggunaan anggaran dan memberi masukan agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai aturan.”

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat peran penting dalam memastikan manajemen keuangan dan alokasi sumber daya berjalan secara transparan, inklusif, dan efektif memenuhi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan hasil dari implementasi sistem tersebut.

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa;

“Seberapa besar partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang membahas penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran desa? Bagaimana pemerintah desa mendorong masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam musdes terkait pengelolaan anggaran?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Partisipasi masyarakat dalam musdes cukup baik, tapi masih bisa ditingkatkan. Kami dorong mereka hadir dengan menyebar undangan, mengumumkan lewat masjid, dan menjelaskan pentingnya musdes untuk kepentingan bersama.”

Masyarakat Desa (Syamsuddin); “Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa sebenarnya sangat penting karena ini menyangkut bagaimana anggaran desa digunakan untuk kepentingan kita semua. Namun, masih banyak masyarakat yang kurang peduli atau tidak hadir karena merasa tidak punya pengaruh atau mungkin tidak tahu apa manfaatnya. Padahal, musyawarah desa adalah tempat kita bisa menyampaikan usul dan kritik. Pemerintah desa sebenarnya sudah berusaha keras, misalnya dengan membuat pengumuman lewat masjid, atau bahkan mengundang langsung masyarakat. Tapi, menurut saya, supaya lebih banyak orang hadir, pemerintah desa harus lebih aktif mendekati masyarakat, menjelaskan manfaat langsungnya, dan mungkin menyesuaikan waktu musyawarah supaya lebih banyak warga bisa datang, misalnya malam hari setelah orang selesai kerja.”

b. Ketersediaan forum pengaduan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Ketersediaan forum pengaduan;

“Apakah pemerintah desa menyediakan forum atau mekanisme khusus bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, kritik, atau saran terkait pengelolaan keuangan desa? Sejauh mana forum pengaduan yang tersedia digunakan oleh masyarakat, dan bagaimana pemerintah desa menindaklanjuti masukan yang diterima?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Pemerintah desa menyediakan forum seperti musdes dan kotak saran untuk menampung keluhan atau masukan. Forum ini cukup digunakan, dan setiap masukan yang diterima kami tindak lanjuti dengan rapat atau klarifikasi langsung.”

c. Tingkat Pengawasan Masyarakat

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai Tingkat Pengawasan Masyarakat; “Sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran desa dan proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh dana desa? Apa bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, dan bagaimana pemerintah desa merespon upaya pengawasan tersebut?”

Sekretaris Desa (Zaenab, S.E); “Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Mereka bisa langsung memantau proyek atau anggaran melalui musdes dan laporan terbuka. Kami selalu tanggapi masukan mereka untuk perbaikan.”

Masyarakat Desa (Syamsuddin); “Biasanya, saya dan warga lain mengawasi langsung kalau ada proyek di desa, misalnya saat pembangunan jalan atau perbaikan aliran sungai. Kalau ada yang terlihat tidak sesuai, kami laporkan ke kepala dusun atau aparat desa. Selain itu, di musyawarah desa, kami juga bisa bertanya tentang penggunaan anggaran dan hasil-hasilnya. Menurut saya, pemerintah desa sudah cukup baik menerima laporan atau masukan dari masyarakat. Kalau ada masalah, biasanya mereka segera memperbaiki. Apalagi aparat desa telah memasang spanduk,”

5. Akuntabilitas Keuangan Desa

Akuntabilitas keuangan desa merujuk pada tanggung jawab pemerintah desa untuk mengelola dan menggunakan sumber daya keuangan desa dengan cara yang transparan dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan desa, mulai dari penyusunan anggaran, pengeluaran, hingga pelaporan, dilakukan secara terbuka, dapat diaudit, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan, seperti masyarakat dan pemerintah.

Adapun indikator-indikator yang untuk menilai Akuntabilitas Keuangan desa, sebagai Berikut:

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga terkait kepatuhan terhadap peraturan:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan undang-undang? Apakah pemerintah desa mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah desa dalam menyusun laporan seperti APBDes dan laporan realisasi anggaran, dan bagaimana proses pengawasan terhadap hal ini dilakukan?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “Kami pastikan laporan keuangan desa sesuai undang-undang dengan mengikuti panduan dari pemerintah, dan saya menyusun laporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan, seperti APBDes dan realisasi anggaran. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dari kecamatan dan inspektorat kabupaten untuk memastikan semuanya sudah sesuai aturan.”

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga mengenai keterbukaan informasi keuangan:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa secara transparan? Bagaimana keterbukaan informasi keuangan desa membantu memperkuat fungsi pengawasan oleh badan permusyawaratan desa (BPD)?”

Kepala Desa (Zainuddin); “Kami pastikan informasi keuangan desa terbuka untuk masyarakat dengan menyampaikannya lewat musyawarah desa dan papan informasi. keterbukaan ini membantu BPD dalam mengawasi karena mereka bisa ikut memantau dan memberi masukan berdasarkan data yang tersedia.”

c. Pelaporan yang Tepat waktu

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa bunga terkait pelaporan yang tepat waktu:

“Bagaimana pemerintah desa memastikan pelaporan keuangan diselesaikan dan diserahkan sesuai jadwal yang ditetapkan? Sejauh mana ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan mempengaruhi proses evaluasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kabupaten/kota?”

Bendahara Desa (Sumarwah); “ Saya pastikan laporan keuangan selesai tepat waktu dengan mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan. Kalau laporan tidak tepat waktu, itu bisa mempengaruhi penilaian kabupaten dan berpengaruh ke keputusan anggaran berikutnya.”

d. Pelibatan BPD dan Masyarakat

Berikut adalah hasil wawancara dari aparat desa terkait Pelibatan BPD dan Masyarakat:

“Bagaimana pemerintah desa melibatkan BPD dan masyarakat dalam proses pengelolaan dana dan pengawasan keuangan desa?”

Kepala Desa (Zainuddin); “BPD dan masyarakat desa terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan desa lewat musyawarah desa dan rapat rutin. Mereka ikut memantau penggunaan anggaran dan memberi masukan agar pengelolaan keuangan lebih transparan dan sesuai aturan.”

Pembahasan

Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan pada 2015 oleh BPKP dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung transparansi keuangan desa. Aplikasi ini memberi desa kewenangan lebih dalam pemerintahan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Siskeudes membantu desa mandiri dalam mengelola pemerintahan, sumber daya, keuangan, dan aset (Beno et al., 2022).

Berikut ini deskripsi Optimalisasi Akuntabilitas Desa Bunga Melalui Implementasi Sistem Keuangan Siskeudes:

1. Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Penggunaan Siskeudes di Desa Bunga menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan, serta telah menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan desa.

a. Penggunaan Aplikasi Siskeudes

Penelitian menunjukkan bahwa Siskeudes telah rutin digunakan dalam pengelolaan keuangan desa, menandakan tingkat kepercayaan tinggi terhadap efisiensi kerjanya. Dibandingkan metode manual, aplikasi ini memudahkan pengelolaan keuangan melalui integrasi data yang baik, sehingga menghemat waktu dan mengurangi risiko kesalahan administrasi. Transparansi yang diwujudkan melalui publikasi laporan keuangan juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dan kepercayaan masyarakat, karena informasi tersebut memudahkan masyarakat memantau penggunaan anggaran desa secara langsung.

Penggunaan Siskeudes di Desa Bunga mencerminkan konsistensi dan kepercayaan terhadap fungsionalitas serta efisiensi dalam pengelolaan data keuangan. Hal ini berdampak positif baik dalam peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan maupun kepercayaan masyarakat.

b. Kemampuan Aparat Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa telah memiliki pemahaman dasar yang cukup mengenai fitur utama Siskeudes, seperti penginputan data keuangan dan penyusunan laporan. Namun, pembaruan atau perubahan aplikasi sering menimbulkan kesulitan karena pelatihan lanjutan yang belum memadai. Meskipun pelatihan awal memberikan fondasi yang kuat, keterbatasan pelatihan tambahan membuat aparat desa merasa kurang yakin ketika menghadapi fitur baru atau situasi kompleks. Oleh karena itu, pendampingan berkelanjutan sangat diperlukan agar perubahan sistem dapat diadaptasi dengan cepat dan tepat. Selain itu, keunggulan aplikasi yang dapat digunakan secara offline memastikan pengelolaan keuangan desa tetap lancar meskipun akses internet tidak stabil.

c. Ketepatan Waktu

Penelitian menunjukkan bahwa fitur otomatis Siskeudes, seperti penghitungan anggaran dan penyusunan laporan, mempercepat proses kerja dibandingkan metode manual. Antarmuka yang sederhana memudahkan aparat desa menghasilkan laporan cepat dan akurat, asalkan data yang dimasukkan lengkap dan benar. Meski demikian, jika data tidak memadai, laporan tetap perlu revisi.

d. Kemudahan akses

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat berfungsi secara offline di Desa Bunga, memungkinkan pekerjaan tetap berjalan meskipun akses internet tidak stabil. Namun, pembaruan sistem yang memerlukan penyesuaian menjadi tantangan, terutama jika pelatihan lanjutan kurang memadai. Selain itu, akses yang terbatas untuk menjaga keamanan data dapat menjadi kendala jika pengguna utama mengalami kesulitan teknis. Meskipun offline, sinkronisasi data tetap bergantung pada koneksi internet yang kurang memadai di beberapa wilayah.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Tingkat pendidikan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pemahaman aparat desa dalam aturan keuangan dan penggunaan aplikasi. Aparat

dengan pendidikan lebih tinggi cenderung lebih cepat memahami dan lebih teliti dalam tugas administrasi keuangan. Namun, seluruh perangkat desa didorong untuk terus belajar dan saling membantu agar tugas dapat berjalan dengan baik, terlepas dari tingkat pendidikan. Dukungan ini diwujudkan melalui pelatihan dan kolaborasi antaranggota dalam menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan teknis dan pendampingan menjadi solusi bagi aparat yang membutuhkan waktu lebih dalam memahami tugasnya. Dengan demikian, meskipun pendidikan mempengaruhi efisiensi kerja, pembelajaran berkelanjutan dan kerja sama tim dapat menyetarakan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa.

b. Pelatihan dan Keterampilan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan sangat membantu dalam mengoperasikan Siskeudes dan memahami aturan keuangan desa. Namun, dalam beberapa kasus, diperlukan pelatihan tambahan untuk menangani masalah teknis yang lebih kompleks. Efektivitas pelatihan terlihat dari peningkatan kemampuan aparat desa dalam menyelesaikan tugas administratif secara efisien dan sesuai aturan. Tantangan teknis yang masih muncul menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan agar perangkat desa dapat beradaptasi dengan perubahan sistem atau regulasi. Untuk mengoptimalkan pelatihan, pemerintah desa dapat menyelenggarakannya secara berkala, melibatkan narasumber ahli, dan menyediakan sesi pendampingan praktik langsung. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat pemahaman terhadap kebijakan dan tata kelola keuangan desa.

c. Pengalaman Kerja

Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman kerja aparat desa sangat penting dalam pengelolaan keuangan. Aparat yang berpengalaman, seperti bendahara lama, lebih cepat mengatasi masalah teknis dan administratif serta dapat menyusun laporan tepat waktu meskipun ada perubahan aturan. Pengalaman ini meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi dengan regulasi baru dan memperkuat kinerja administrasi keuangan desa.

3. Infrastruktur Teknologi

a. Ketersediaan Perangkat Komputer

Penelitian menunjukkan bahwa perangkat komputer yang memadai berpengaruh signifikan terhadap kelancaran pengelolaan keuangan desa melalui Siskeudes. Komputer yang berfungsi baik memungkinkan penyusunan laporan dan pemantauan anggaran lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana desa.

b. Akses Internet

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses internet di desa kadang tidak stabil meskipun umumnya cukup mendukung penggunaan Siskeudes untuk sinkronisasi data dan pengiriman laporan. Solusi sementara seperti mencari lokasi dengan sinyal lebih baik atau menggunakan hotspot membantu, namun kendala ini masih berpotensi menghambat kecepatan sinkronisasi dan pengiriman laporan. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur internet di desa sangat penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan desa.

c. Pemeliharaan Perangkat

Penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan perangkat komputer di desa dilakukan sesuai kebutuhan, meskipun tidak ada jadwal rutin yang spesifik. Pemerintah desa cukup responsif terhadap masalah teknis, terutama terkait komputer untuk Siskeudes. Namun, pemeliharaan yang lebih terjadwal dan proaktif—baik untuk perangkat keras maupun lunak—dapat mengurangi risiko gangguan dan mendukung kelancaran pengelolaan keuangan desa dalam jangka panjang.

4. Akuntabilitas Keuangan Desa

a. Kepatuhan Terhadap Peraturan

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bunga berkomitmen menerapkan aturan pengelolaan keuangan sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014. Laporan keuangan disusun mengikuti standar APBDes dan laporan realisasi anggaran untuk memastikan transparansi dan akurasi. Mekanisme pengawasan oleh kecamatan dan inspektorat membantu mendeteksi potensi penyimpangan, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman detail regulasi dan keterbatasan sumber daya tetap perlu diantisipasi.

b. Keterbukaan Informasi Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bunga telah menerapkan keterbukaan informasi melalui musyawarah desa dan papan informasi, sehingga masyarakat mendapat akses langsung ke data anggaran, realisasi keuangan, dan program desa. Keterbukaan ini memudahkan BPD dalam mengawasi pengelolaan keuangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan serta pengawasan. Berikut adalah hasil pemeriksaan Inspektorat terkait penggunaan aplikasi SISKEUDES dalam bentuk Keterbukaan Informasi Keuangan.

c. Pelaporan yang Tepat waktu

Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bunga disiplin dalam menyusun dan menyerahkan laporan keuangan tepat waktu dengan dukungan Siskeudes. Ketepatan pelaporan mendukung evaluasi oleh pemerintah kabupaten dalam pengambilan keputusan strategis. Fitur otomatisasi Siskeudes meminimalkan kesalahan dan mempercepat proses laporan, meskipun gangguan teknis seperti pembaruan sistem atau jaringan internet yang tidak stabil dapat mempengaruhi sinkronisasi data.

d. Pelibatan BPD dan Masyarakat

Pelibatan BPD dan masyarakat di Desa Bunga dilakukan melalui Musdes dan rapat rutin. BPD berperan sebagai pengawas anggaran dengan memberikan masukan terkait rencana dan realisasi penggunaan dana desa, sedangkan masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial dengan memantau langsung proyek desa. Partisipasi ini meningkatkan rasa kepemilikan dan kepercayaan terhadap pemerintah desa. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran, keterbatasan pemahaman BPD, serta distribusi informasi yang belum merata perlu diatasi melalui pelatihan, edukasi, dan publikasi informasi keuangan secara luas.

5. Partisipasi Masyarakat

a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Desa

Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musdes terkait pengelolaan anggaran desa sudah cukup baik. Pemerintah desa mendorong kehadiran warga melalui undangan langsung, pengumuman di masjid, dan penjelasan manfaat Musdes. Namun, peningkatan kesadaran dan penyesuaian waktu pelaksanaan Musdes diperlukan untuk memperbesar partisipasi, sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

b. Ketersediaan forum pengaduan

Pemerintah desa menyediakan forum pengaduan melalui Musdes dan kotak saran untuk menampung keluhan, kritik, dan saran terkait pengelolaan keuangan serta isu desa lainnya. Forum ini sudah digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana masukan tersebut ditindaklanjuti. Jika respon terhadap keluhan kurang memadai, kepercayaan masyarakat bisa menurun. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan aksesibilitas forum pengaduan sangat penting guna memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi aktif dalam pengelolaan desa.

c. Tingkat Pengawasan Masyarakat

Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat terhadap anggaran desa dan proyek pembangunan dibiayai dana desa sudah cukup aktif. Masyarakat aktif memonitor dan melaporkan ketidaksesuaian, sementara pemerintah desa responsif melakukan perbaikan. Namun, efektivitas pengawasan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan

keterlibatan masyarakat dan penyediaan informasi yang jelas serta mudah diakses, sehingga mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Siskeudes di Desa Bunga telah dilaksanakan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Seluruh tahap pengelolaan keuangan desa – dari perencanaan hingga pertanggungjawaban – sepenuhnya menggunakan aplikasi ini, yang mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Pengoptimalan akuntabilitas desa melalui penggunaan Siskeudes telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Proses pelaporan yang hanya memerlukan satu kali input data mulai dari perencanaan, penganggaran APBDes, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban membuat kinerja pemerintah desa, terutama bagi bendahara, menjadi lebih efektif dan efisien.

Setelah penerapan Siskeudes di Desa Bunga, respons masyarakat positif karena kemudahan akses laporan keuangan, yang membuat mereka lebih terlibat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Partisipasi aktif masyarakat ini turut meningkatkan kepercayaan dan mendorong pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bunga memberikan dampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Faktor utama yang mendukungnya adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat desa, infrastruktur teknologi yang memadai, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan anggaran desa.

Meskipun ada tantangan seperti akses internet yang tidak stabil dan keterbatasan partisipasi masyarakat, pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah perbaikan. Penggunaan SISKEUDES menyederhanakan administrasi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan efektivitas kinerja pemerintah desa..

Saran

1. Peningkatan Kompetensi SDM adakan pelatihan rutin dan pendampingan langsung agar aparat desa lebih mahir mengoperasikan Siskeudes.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi tingkatkan kualitas perangkat, terutama komputer dan koneksi internet, untuk mendukung operasional Siskeudes.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dukasikan masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam Musdes dan mekanisme pengaduan untuk memperkuat pengawasan.
4. Pemeliharaan Perangkat Rutin terapkan sistem pemeliharaan berkala untuk perangkat keras dan lunak guna mencegah gangguan teknis.
6. Pemberdayaan Kelompok Pengawasan bentuk kelompok pengawasan masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa.
7. Kolaborasi Eksternal jalin kemitraan dengan penyedia layanan internet dan konsultan keuangan untuk mendukung operasional dan penyelesaian masalah teknis Siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 63–76. <https://www.neliti.com/id/publications/122554/pengakuan-atas-kedudukan-dan-keberadaan-masyarakat-hukum-adat-mha-pasca-dibentuk#cite>
- Wulandari, N. (2022). IE Ja W ng id an ya P Wi la w. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (Pt Kai) Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Kereta Api Kelas Eksekutif Taksaka*, 55, 1–95.
- Rusmianto, Y. &, & Stefanus, D. (2019). (Studi Empiris di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman) Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Studi Empiris Di Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman*, 8(10), 4–4. jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2682
- Anggraeni, M., & Fitriyah, H. (2024). Optimizing Village Accountability Through SISKEUDES Financial System Implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 25(2), 1–11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i2.1395>
- Nurfalah, I., & Rusydiana, A. S. (2019). Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Keuangan Inklusif: Kerangka Maqashid Syariah. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v11i1.1205>
- Keuangan, S., & Siskeudes, D. (2024). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Kasus Pada Desa Puay Kabupaten Jayapura)*.
- Keuangan, S., & Siskeudes, D. (2024). *Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Kasus Pada Desa Puay Kabupaten Jayapura)*.
- Susano, A., & Rachmawati, M. (2024). Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Desa Melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). *EKOBIS : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 50–5